

## EXECUTIVE SUMMARY

Perencanaan adalah hal yang penting dan harus disusun karena sebagai arah di dalam pelaksanaan program kegiatan. Berdasarkan argumentasi tersebut, untuk mengetahui arah kebijakan penanaman modal di Jawa Tengah maka perlu disusun dokumen Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal. Dokumen Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal adalah perencanaan untuk lima tahun ke depan yaitu 2020-2025 yang di dalamnya terdapat indikator-indikator terkait dengan urusan penanaman modal serta target-target yang harus dicapai. Dokumen Perencanaan Penanaman Modal sebagai dasar/acuan dalam perencanaan jangka menengah adalah dengan mendasarkan pada Rencana Umum Penanaman Modal dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 — 2023. Dokumen Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal ini akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tahunan, sehingga setiap tahun dapat dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator urusan Penanaman Modal.

Untuk mencapai angka investasi yang diinginkan beberapa strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk pemulihan ekonomi secara keseluruhan dalam jangka pendek, pemulihan sisi permintaan agregat terutama konsumsi masyarakat adalah strategi jangka utama terkait dampak Covid-19. Strategi ini dapat merupakan strategi kombinasi dengan pemerintah pusat seperti realisasi subsidi langsung, kartu prakerja dengan Pemprov dan Pemkab-Pemkot di Jawa Tengah melalui koordinasi yang baik. Pemerintah Provinsi dan Pemkab-Pemkot dapat melakukan kebijakan yang bersifat pengawalan kepada realisasi penyaluran subsidi yang tepat (dengan melakukan pendataan akurat), Pemprov dan Pemkab-Pemkot melengkapi kebijakan pemulihan sisi permintaan dengan pemberian subsidi dan kebijakan lainnya.
2. Pemulihan sisi permintaan diiringi dengan strategi-strategi yang menggerakkan sektor penyedia produk-produk yang tumbuh dengan peningkatan permintaan, termasuk memberikan perhatian besar kepada UMKM. Strategi ini juga dapat dilakukan dengan kombinasi dengan strategi yang dijalankan pemerintah pusat (dengan skim PEN), dan juga berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Selain bantuan permodalan (kombinasi dengan program PEN), Pemerintah Daerah dapat melakukan bantuan pengembangan pemasaran melalui bantuan teknologi terutama yang mendukung akses digital, pembelian produk UMKM, kemudahan penyaluran hasil produksi melalui pasar murah online dan offline, membangun forum market place, menjamin distribusi barang lebih lancar mencakup permasalahan distribusi seperti infrastruktur jalan, jembatan, terutama di wilayah-wilyah produksi (hulu) terutama pertanian. Strategi permodalan UMKM di Jawa Tengah dapat melanjutkan program bunga murah oleh Bank Jateng, maupun subsidi bunga lainnya.

3. Strategi-strategi insentif dan kemudahan perijinan yang mendorong aktivitas dan investasi sektoral, misalnya perijinan yang menyangkut IMB. Dari FGD yang dilakukan dengan pengusaha, permasalahan IMB masih menjadi perhatian di kalangan pengusaha. Pengusaha juga menekankan perlunya perhatian dan kemudahan dapat diperoleh lebih banyak di tahun 2021, terutama terkait dengan dampak pandemi Covid-19. Ide kreatif perlu terus dikembangkan terkait masuknya investasi ke Jawa Tengah.
4. Pemerintah daerah harus proaktif melakukan pembangunan infrastruktur daerah, yang dikombinasikan dengan program infrastruktur pemerintah pusat. Kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten dan jalan desa; pembangunan infrastruktur di desa dengan optimalisasi dana desa; pembangunan instalasi sampah, dan lainnya.
5. Beberapa investasi di industri harus digerakkan dan diberi perhatian di tahun 2021 seperti industri-industri yang akan masuk ke Kawasan Industri Kendal, dan pembangunan cepat Kawasan Industri Batang dan Brebes. Berdasarkan informasi dari pengusaha bahwa sewa lahan di Kawasan industri yang dianggap tinggi, maka dapat dipikirkan kebijakan semacam skim subsidi sewa lahan sebagai insentif bagi calon penyewa Kawasan industri terutama yang memiliki multiplier tenaga kerja daerah dan output bagi industri lainnya di Jateng, menunjang ekspor, dan konten lokal tinggi. Subsidi dapat diberikan pada tahun-tahun awal. Pembangunan klaster-klaster industri lainnya misalnya klaster furnitur dan lain-lain perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kebangkitan investasi, didukung dengan optimisme pengusaha untuk perekonomian tahun 2021.
6. Perlu perhatian pada peningkatan investasi pada bidang pertanian khususnya pertanian berbasis teknologi tinggi, seperti pengembangan *green house* dengan sistem pengairan yang efisien, dan lain-lain. Di samping hal ini dapat memberikan penekanan pada pertambahan penggunaan lahan yang kecil (intensifikasi), juga menciptakan hasil panen yang berkualitas tinggi dan lebih unggul di dunia internasional. Dari informasi pengusaha, peluang buah-buahan tropis sangat besar di Asia Pasifik, Eropa, Amerika, dan Kanada. Kebijakan ini dapat dilanjutkan misalnya dengan aktivitas-aktivitas pengembangan teknologi bibit, dalam bentuk kerja sama misalnya dengan pemberian fasilitas kepada lembaga-lembaga penelitian perurahaan, perguruan tinggi, lembaga litbang pemerintah dan swasta, termasuk mendatangkan ahli asing untuk memberikan pelatihan pengembangan pertanian jika diperlukan.
7. Insentif pajak termasuk melalui pengembangan KI menjadi KEK (Kawasan ekonomi khusus). Kebijakan insentif pajak ini dapat melanjutkan dan mengawal realisasi kebijakan *tax allowance* pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menkeu No. 150/PMK.010/2018 dan Peraturan BKPM No.1/2019. Insentif-insentif seperti *tax deduction* untuk industri padat karya telah tersedia (PP 45/2019, dan

Permen Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020), dan dikuatkan implementasinya oleh Pemda di Jawa Tengah.

8. Strategi jangka menengah dan panjang tetap dijalankan dalam rangka menyiapkan daya saing yang menciptakan produktivitas tenaga kerja, sehingga tidak terus menerus mengandalkan upah murah semata. Dilanjutkan dengan peningkatkan *skill* melalui pelatihan-pelatihan yang lebih sering dan tersistem. Untuk ini perlu investasi di bidang Pendidikan dan Pelatihan lebih banyak. Kebijakan-kebijakan insentif yang tersedia oleh pemerintah pusat diantaranya insentif untuk kegiatan vokasi (PP 45/2019).
9. Dapat dibentuk Satgas Investasi yang tugasnya terkait langsung maupun tidak langsung dengan peningkatan investasi. Terutama yang tidak langsung, misalnya satgas dapat menyiapkan informasi produk lokal yang dapat menjadi pendukung industri-indutri yang akan dikembangkan di Jawa Tengah. Satgas ini secara langsung juga dapat memastikan terus-menerus permasalahan implementasi kebijakan pro investasi di lapangan.
10. Kepastian hukum, pemberantasan korupsi, kampanye yang menjadikan semangat anti korupsi menjadi semangat bersama di Jateng serta kampanye membeli produk Jateng dan Indonesia terus digencarkan. Bekerjasama dan memanfaatkan temuan Perguruan Tinggi, seperti Universitas Diponegoro, dengan Nano Tech dan Asap Cair, dan Mendorong Produksi Massal, menjadikan Universitas sebagai R&D yang *sustainable* untuk Pembangunan Daerah. Untuk Pengembangan R&D juga tersedia Insentif Pajak (PP 45/2019).